

**PILKADA DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
(STUDI TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
MENGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PILKADA KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2005)**

TESIS

Oleh

SAFRUDIN
05 202 044



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**



**PILKADA DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
(STUDI TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
MENGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PILKADA KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2005)**

Oleh : SAFRUDIN

(Dibawah bimbingan : Erwin dan Sri Zul Chairiyah)

RINGKASAN

Pemilihan umum merupakan indikator dinamisnya demokratisasi suatu Negara. Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengan pilkada langsung ini terutama ketidaksiapan materi dan infrastruktur, namun demikian momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi dan pilkada langsung sebenarnya berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi, tapi partisipasi politik masyarakat pada pilkada cenderung menurun. Kecenderungan menurunnya angka partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dapat dilihat dari pelaksanaan beberapa pilkada terakhir, dimana rata-rata tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilkada secara nasional yang berlangsung Juni sampai dengan Juli 2005 dengan total 167 pilkada adalah 73.14%, yang berarti angka golputnya sebesar 26.86% (*Desk Pilkada Depdagri, 2005*), sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005, sebesar 72.23%), yang berarti angka non voternya berjumlah ± 27 %. Berdasarkan hal itu maka penulis ingin mengetahui dan melakukan Studi tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2005.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal-awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyemai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2004 lalu yang berjalan lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarianisme, penyelenggaraan pemilu tahun 2004 yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini. Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengan Pilkada langsung ini terutama ketidaksiapan materi dan infrastruktur, namun demikian momentum Pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi. Sebagai konsekuensi negara demokrasi,

Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 untuk pemilihan calon legislatif dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era reformasi telah berlangsung

secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia.

Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih, atau mulai meningkatnya golongan putih (non voter), dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dengan tingkat partisipasi politik pemilih tertinggi 96,6% pada Pemilu tahun 1971. Lebih-lebih jika dinilai dengan penyelenggaraan Pilkada sebagai bagian dari Pemilu yang telah berlangsung di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa sebagai konsentrasi mayoritas penduduk Indonesia juga menunjukkan potensi golput yang besar berkisar 32% sampai 41,5%. Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya. Di tengah belum menguatnya kesadaran politik di level grass root, maka momentum pilkada menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang potensi konflik, manipulasi, money politics dan intimidasi.

Dalam konteks penguatan demokratisasi, pilkada langsung sebenarnya berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Rakyat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal dalam menuju lajur demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat sangatlah penting guna keberlangsungan demokrasi khususnya di tingkat lokal Kabupaten Dharmasraya. Serta juga memberikan sebuah pencerahan bagi masyarakat umum bagaimana partisipasi tersebut jangan salah digunakan dalam pemilihan umum. Karena pemilihan umum atau pilkada merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah. Dengan demikian pemilihan umum atau pilkada merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya, studi tentang partisipasi politik masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada kabupaten Dharmasraya, maka penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik dan KPUD sebagai penyelenggara pilkada secara kuantitas masih kurang dan ini adalah memang karena terbatasnya waktu antara pembentukan KPUD dengan pelaksanaan pilkada. sehingga banyak warga yang belum benar-benar memahami tentang pentingnya memberikan suara pada pilkada dan

pentingnya partisipasi mereka untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah ini.

- 2) Petugas yang ditunjuk dan diberi kepercayaan untuk pemuktahiran data pemilih belum bekerja secara maksimal hal ini terlihat dari masih cukup banyaknya warga yang tidak terdaftar, warga yang tidak mendapat kartu pemilih dan tidak mendapatkan surat undangan.
- 3) Administrasi pemilihan yang kurang baik, sehingga pemilih yang terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh tidak adanya undangan kepada pemilih untuk menggunakan haknya.
- 4) Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya kesadaran untuk mendaftarkan dirinya secara aktif ke petugas pendataan sebagai wujud dari partisipasi aktif pemilih dalam mengsucceskan pilkada perlu untuk juga untuk ditingkatkan dalam segala hal.

Berkaitan dengan paparan diatas sehingga masih banyaknya warga atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya antara lain:

- a) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan untuk memilih.
- b) Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mempunyai waktu untuk datang ke TPS guna memberikan suara atau memberikan hak pilihnya, karena alasan ekonomi dan social, karena harus bekerja

dan beraktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder, seperti berdagang dan bertani.

- c) Dan pemilih yang sengaja dengan sadar untuk tidak memilih karena dianggap tidak memberikan manfaat terhadap dirinya secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan maka saran yang dapat penulis sampaikan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Dharmasraya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- 1) KPUD Kabupaten Dharmasraya harus melaksanakan sosialisasi jauh sebelum pelaksanaan pilkada dengan tujuan mengenalkan pentingnya pilkada kepada masyarakat lebih dini, sehingga masyarakat mempunyai waktu yang cukup untuk bisa memahami betapa pentingnya berpartisipasi dalam pilkada.
- 2) Pihak KPU harus membuat program-program sosialisai yang terpadu, sistematis, berkesinambungan dan dengan media yang digunakan diharapkan mampu menarik orang dan memberikan dampak secara luas, sehingga masyarakat terpacu untuk menggunakan hak pilihnya.
- 3) Petugas yang bertanggungjawab dalam pemuktahiran data harus benar-benar mengetahui keadaan warga di lokasi, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan atau validitasnya terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Mursal, 2004, *Political Marketing: Strategi Menenangkan Pemilu*, Jakarta
- Afrizal, 2005, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari Pengertian sampai penulisan laporan*. Padang : Laboratorium Sosiologi Fisip Unand,
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta,
- Alwasilah, A.Chaedar, 2003, *Pokoknya kualitatif : Dasar dasar Merancang Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Bogdan, R.C., and Biklen, S.K., 1982, *Qualitative research for education an introduction to theory and methods*. London: Allyn and Bacon Inc.
- Bryant G. White, 1982, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta : LP3ES.
- Budiardjo, Miriam, 1981, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : Gramedia,
- , 1985, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- , 1996, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- , 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia.
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Irawan, Prasetya, 2000, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Juliansyah, Elvi, 2007, *Pilkada*, Bandung : Mandar Maju.
- Koentjaraningrat, 1988, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : Dian Rakyat.
- Lincoln, Y.S, and Guba, E.G.L., 1985, *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill, CA: Sage Publication Inc.